

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ashshofa, Burhan, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.

Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kuffal, H.M.A., 2007, *Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan*, UMM Press, Malang.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pangaribuan, Aristo M.A et al., 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Libesamsansrty, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1986.

Samosir, Djisman, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun FH UGM, 2018, *Buku Panduan Program Sarjana Fakultas Hukum 2018*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Timotius, Kris H, 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI Jaksa Agung RI Komisi Pemberantasan Korupsi RI Menkumham RI Mahkamah Agung RI Menteri Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2011 Nomor Kep/259/A/Ja/12/2011 Nomor Kepb-01/01-55/11/2011 Nomor M.Hh-10.Hm.03.02 Tahun 2011 Nomor 199/Kma/Skb/XII/2011 Nomor 219/Pmk.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehakiman Nomor:

M.05.UM.01.06/1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara RI.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER 002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP 112/JA/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan, dan Penataan Barang Bukti.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/23/X/2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Lampiran Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

C. Internet

Dedy Christanto, 2016, “Langkah Strategis Wujudkan Revenue Centre DJKN Melalui Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara”, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

Direktorat tjen Pemasyarakatan, 2015, “Rupbasan Purwokerto Sosialisasikan Aplikasi SIPBB ke Instansi Terkait”, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/>.

Febrianto, Samuel, 2016, “Mengoptimalkan Pengelolaan Benda Sitaan”, diakses dari <http://www.tribunnews.com>.

Hukumonline, “Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?”, diakses dari <https://hukumonline.com>.

- Hukumonline, “Mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Manthovani, Reda, “Membenahi Carut Marutnya Benda Sitaan”, diakses dari <http://www.kejari-jakbar.go.id>.
- Polres Banjarbaru, “Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti”, diakses dari <https://banjarbaru.kalsel.polri.go.id/>.
- Profil Organisasi Direktorat Pemasyarakatan, diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id>.
- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Reformasi Rutan serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan, diakses dari <https://pshk.or.id>.
- Rivki (detikNews), 2016, “Barang Sitaan Kejahatan Tak Terurus, Negara Bisa Dirugikan Ratusan Miliar”, diakses dari <https://news.detik.com>.
- Satelit Post, 2018, “Kejari dan Rupbasan Luncurkan Aplikasi”, diakses dari <https://satelitpost.com/>.
- KPK RI, tahun, “Sekilas KPK”, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/>.
- Hukum Online, “Membuat Garis Pemisah Wewenang Penyidikan dan Penuntutan”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/>.
- Kejaksaan Agung RI, “Sejarah”, diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/>.

D. Penelitian dan Jurnal

- Angkasa, “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 10 No. 3, 2010.
- Gunarto, Marcus Priyo, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, Vol. 21 No. 1, 2009.
- Manalu, Paris, 2015, “Perampasan Aset Terhadap Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga”, *Karya Tulis Dalam Rangka Mengikuti Seleksi Pengadaan Personal Satuan Pelaksana (Satlak) dan Petugas Tata Usaha Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI Gelombang II Tahun Anggaran 2015*, Pematang Siantar.
- Maramis, Frans, “Catatan Singkat: Bukti Pidana dari Aspek Fenomenologi”, *Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.I No.1, 2012.

- Priyanto, Budi, 2010, Pemeliharaan Benda Sitaan Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ricardo, Caesario, 2018, Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Yogyakarta, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sari, Ambar, 2014, Pengelolaan Basan Baran Negara sebagai Potensi Bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Mada, Yogyakarta.
- Tim Pengkajian Hukum BPHN Kemenkumham RI, 2013, Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan, *Kajian BPHN*, Jakarta.

E. Lain-lain

- Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/BAPPENAS, Laporan Kegiatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis IT: Strategi Dan Roadmap Tahun Anggaran 2016, *Koordinasi Strategis Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi: Strategi dan Road Map Sppt It 2016-2019*.
- Wahiddin, “Paparan tentang Fungsi Strategis RUPBASAN dalam Rangka Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara”, Rapat Koordinasi KPK tentang Tata Laksana Basan Baran Negara Dalam Rangka Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi, Hotel Js. Luwansa Jakarta, 21-23 November 2016.
- Wahiddin, “Paparan tentang Peran dan Kemampuan Rumah Penyimpanan Basan Baran Negara”, Acara Konsultasi Teknis Pemeliharaan dan Pengamanan Basan Baran, Holiday Inn Express Jakarta, 27 – 29 Maret 2018.